

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SPIN OFF
PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN
2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS PT. BANK BNI SYARIAH SURAKARTA)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata
1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

BASKORO BUDI PRASETYO
C100140246

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SPIN OFF PERBANKAN
SYARIAH BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS PT. BANK BNI SYARIAH SURAKARTA)**

PUBLIKASI ILMIAH

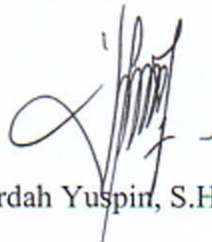
Oleh:

BASKORO BUDI PRASETYO

C100140246

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Wardah Yuspin, S.H, M.Kn, Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SPIN OFF PERBANKAN SYARIAH
BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS PT. BANK BNI SYARIAH SURAKARTA)

Yang ditulis oleh:

BASKORO BUDI PRASETYO

NIM: C. 100.140.246

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. WardahYuspin,S.H,M.Kn,Ph.D

(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Inayah, S.H,M.H

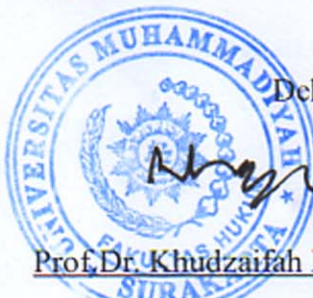
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Mutimatun Ni'ami, S.H,M.Hum.

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)



Dekan,

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum

NIK. 537 / NIDN.0727086803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 November 2018

Penulis



BASKORO BUDI PRASETYO
C100140246

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SPIN OFF PERBANKAN
SYARIAH BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH
(STUDI KASUS PT. BANK BNI SYARIAH SURAKARTA)**

Abstrak

Perbankan Syariah adalah Bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah islam pada masa sekarang ada aturan bahwa apabila Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya sudah lebih dari 50% dari total nilai asset bank induk maka harus segera melaksanakan spin off. Yang dimaksud *spin off* adalah apabila unit kegiatan tersebut kemudian dipisahkan dari sebuah perseroan dan berdiri sebagai perseroan baru yang terpisah sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Proses pembentukan bank BNI Syariah diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Kendala perpindahan spin off di Bank BNI Syariah adalah dalam bidang sumber daya manusia dan IT.

Kata kunci: Perbankan syariah, Spin off, Unit usaha syariah.

Abstract

Sharia Banking is a Bank that operates based on Islamic sharia principles in the present. There is a rule that if a Conventional Commercial Bank that has a Sharia Business Unit whose asset value is more than 50% of the total asset value of the parent bank, it must immediately carry out a spin off. What is meant by spin off is if the activity unit is then separated from a company and stands as a separate new company while the Sharia Business Unit is a work unit of the head office of a Conventional Commercial Bank that functions as the parent office of an office or unit carrying out business activities based on Sharia Principles , The process of establishing a BNI Syariah bank began with the establishment of a Sharia Bank Team in 1999, Bank Indonesia then issued a principle and business license for the operation of the BNI sharia business unit. The obstacle in shifting spin off at Bank BNI Syariah is in the field of human resources and IT.

Keywords: Islamic banking, spin off, sharia business unit.

1. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting bagi pembangunan suatu negara. Hal ini disebabkan karena fungsi dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 7 tahun

1992 yakni bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dan di Indonesia sendiri ada 2 Bank yaitu Bank konvensional dan Bank syariah.

Prinsip Utama Bank Syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal, Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.¹

Perbankan syariah sebagai elemen penting dalam hukum perbankan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat, dimana adanya didukung oleh terbitnya berbagai regulasi secara kelembagaan maupun berkaitan dengan kegiatan usaha. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintrodusinya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu “ragu” lagi mengenal boleh/tidaknya memakai jasa perbankan terutama ditinjau dari kacamata agama. Bahwa yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), akan tetapi karena didalam operasionalnya terdapat unsure-unsur yang dilarang, berupa unsur perjudian (*maysyir*), unsure ketidak pastian/keraguan (*garar*), unsure bunga (*interest/riba*), dan unsur kebatilan.²

¹ Institut Bankir Indonesia (2001), *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Penerbit Djambatan) hal.23.

² Abdul Ghofur Anshori, “sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional, Vol. II, No. 2, Desember 2008, hal.159-160.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber Data terdiri dari Data Primer diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan keterangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dan Data Sekunder yang berupa literature-literatur, arsip serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Metode Pengumpulan data dengan Studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip dari buku, literature, arsip, Peraturan perundangan maupun dokumen serta tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.³ objek yang diteliti; Studi Lapangan metode. Metode Analisis Data menggunakan teknik analisis data secara analisis-kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Tujuan dilakukannya Spin Off dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Nizar adalah agar perkembangan perbankan syariah dapat terfokus kepada bank syariah, yakni bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sehingga kedepannya tidak ada lagi unit usaha syariah (UUS). Dengan difokuskannya perkembangan perbankan syariah kedalam bank syariah baik dari segi kelembagaan maupun peraturan-peraturan mengenai perbankan syariah, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah itu sendiri, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip kesehatan bank bagi bank syariah, dan juga diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap bank syariah yang diatur dalam undang-undang tersendiri.⁴

³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal.211.

⁴ Ahmad Nizar, 2015, Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off, Skripsi, Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal. 31-33.

Tujuan itulah yang ingin dicapai pula oleh Bank BNI dengan memisahkan Bank BNI Konvensional dengan Bank BNI Syariah. Pelaksanaan spin off dipercaya mampu memberikan dampak positif sebagaimana yang telah dialami oleh perusahaan-perusahaan di Eropa yang melakukan praktek spin off dan berhasil meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa melalui a) membentuk dan menambah perusahaan baru; b) meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang sehat; c) meningkatkan inovasi dari perusahaan hasil spin-off; d) meningkatkan potensi kewirausahaan; e) meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang; f) memberikan keuntungan bagi perusahaan induk; g) memperbesar daya saing wilayah; h) menciptakan pasar-pasar baru; dan i) menciptakan lingkungan yang dinamis karena adanya interaksi antara teknologi, kewirausahaan, kluster industri pada wilayah ekonomi yang berbeda.⁵

Spin off merupakan salah satu metode dalam mendirikan bank syariah yakni dimana bank konvensional yang telah memiliki UUS dan telah memenuhi syarat untuk menjadi bank umum syariah sehingga perlu dilakukan pemisahan antara bank konvensional dengan UUS menjadi bank umum syariah.⁶ Persyaratan tersebut meliputi modal yang memadai, sumber daya manusia yang tersedia dan jaringan kantor.⁷ Usaha pembentukan perbankan syariah pada bank-bank konvensional didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

⁵ Rifin A, Saptono IT, Pemilihan Metode Spin Off Unit Bisnis Syariah, Jurnal Al-Muzara'ah 124 (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363), Magister Manajemen dan Bisnis, dikutip pada tanggal 12 Oktober 2018, pukul 11.30 wib.

⁶ Loc cit, Wardah Yuspin, hal. 126

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 3

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 318 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Dimana Bank BNI Syariah jika dilihat dari sejarahnya merupakan salah satu bank yang berdiri dengan cara spin off dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Saat ini, bank BNI telah memiliki bank umum syariah dengan nama Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI. Bank Negara Indonesia merupakan bank pertama atau pelopor terciptanya berbagai produk dan layanan jasa perbankan di Indonesia. BNI terus memperluas peran dan kinerjanya, dengan tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagai segmen, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah sebagai bank khusus bagi anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 72 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif. Tidak hanya terbatas pada penciptaan produk dan layanan perbankan, bahkan lebih dari itu BNI juga bertekad untuk menciptakan “value” pada setiap karyanya. Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan Bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini 40 menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46” dan ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Dari tahun ke tahun BNI selalu menunjukkan kekuatannya dalam industri perbankan dan kepercayaan masyarakat pun terbangun dalam memilih Bank Negara Indonesia sebagai pilihan tempat penyimpanan segala alat kekayaan yang terpercaya. Permintaan akan perbankan yang sesuai

dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah.

Dalam proses pendirian bank BNI syariah, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melakukan spin off. Bank BNI sebagai bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah mendirikan bank umum syariah yang modalnya berasal dari seluruh aset dan kewajiban yang ada pada unit usaha syariah itu sendiri, kemudian dilakukan spin-off terhadap unit usaha syariah tersebut setelah keluarnya persetujuan operasional bank umum syariah dari Bank Indonesia. Proses pembentukan bank BNI Syariah diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang, syariah sebagai berikut :⁸

Tepatnya pada tanggal 29 April 2000 BNI Syariah membuka 5 kantor cabang syariah sekaligus di kota-kota potensial, yakni: Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.

Tahun 2001 BNI Syariah kembali membuka 5 kantor cabang syariah yang difokuskan ke kota-kota besar di Indonesia, yakni : Jakarta (2 cabang), Bandung, Makassar, dan Padang.

Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat untuk layanan perbankan syariah, tahun 2002 lalu BNI Syariah membuka dua kantor cabang syariah baru di Medan dan Palembang.

Di awal tahun 2003, dengan pertimbangan load bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada

⁸ <http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/sejarah.aspx>

masyarakat, BNI Syariah melakukan relokasi kantor cabang syariah dari Jepara ke Semarang. Sedangkan untuk melayani masyarakat kota Jepara, BNI Syariah membuka Kantor Cabang Pembantu Syariah Jepara.

Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syariah membuka layanan BNI Syariah Prima di Jakarta dan Surabaya. Layanan ini diperuntukkan untuk individu yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.

Bank BNI Syariah tahun 2005-2010 merupakan bentuk usaha syariah. Pada masa itu sebenarnya telah ada kebijakan unit usaha syariah untuk melepaskan diri dari bank konven, namun pada kenyataannya masih menginduk pada bank konvensional. Saat ini Bank BNI Syariah sudah menjadi bank umum syariah namun masih menginduk atau merupakan anak perusahaan dari bank konvensional karena saham terbesar bank BNI syariah berasal dari bank konvensional.⁹ Proses persiapan perpindahan spin off pada Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah di Bank BNI juga dilakukan dengan persiapan-persiapan lain seperti persiapan gedung, recruitment sumber daya manusia, dan izin dari bank Indonesia juga otoritas jasa keuangan.¹⁰

Corporate Plan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009, namun perijinan baru diperoleh secara lengkap pada bulan Mei 2010, sehingga spin off baru resmi baru dapat dilakukan pada bulan Juni 2010 tepatnya pada tanggal 19 Juni 2010 berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah, yang dibuat secara notariil oleh notaris Sutjipto S.H, M.Kn dengan Akta nomor 160 tanggal 22 Maret 2010. Keputusan manajemen BNI untuk melakukan pemisahan

⁹ Wawancara Bapak Fendi Prihantoro, Kepala Bagian Umum Bank BNI Syariah cabang Surakarta di Jl. Slamet Riyadi No. 318 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Surakarta, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 10.00 wib.

¹⁰ Wawancara Bapak Fendi Prihantoro, Kepala Bagian Umum Bank BNI Syariah cabang Surakarta di Jl. Slamet Riyadi No. 318 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Surakarta, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 10.00 wib.

unit usaha syariah tentunya diambil dengan berbagai pertimbangan, baik terkait sisi internal maupun eksternal perusahaan. Dari sisi eksternal, bisnis perbankan syariah merupakan bisnis yang relatif baru dikenal oleh masyarakat sehingga masih memiliki potensi bisnis yang besar untuk dikembangkan. Selain itu, dengan perkembangan informasi yang semakin cepat, kesadaran masyarakat akan menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam transaksi perbankan juga mengalami peningkatan. Sementara itu, faktor internal yang melatarbelakangi UUS BNI menjadi BUS adalah business plan UUS saat pendirian memang mendesain UUS bersifat temporer dan telah menargetkan spin off pada tahun 2009. UUS BNI juga telah memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai, baik dari sisi SDM, sistem dan infrastruktur. Customer base yang dimiliki oleh UUS BNI juga cukup besar selain didukung oleh track record dan kinerja yang baik. Saat ini, UUS BNI mempunyai 25 kantor cabang syariah, 30 kantor cabang pembantu syariah, dan 700 syariah channeling outlet (window).

Setelah Bank BNI Syariah resmi berdiri, Bank BNI Syariah melaksanakan sistem perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Berikut beberapa produk dan aplikasi pada bank BNI Syariah, yakni simpanan transaksional dengan type simpanan titipan / wadi'ah (Tabungan iB hasanah wadiah, tabunganku iB, Tabungan Tunas Hasanah, Giro iB hasanah) dan simpanan investasi/mudharabah (Tabungan iB hasanah, iB hasanah Mudharabah, Tabungan iB Prima Hasanah, Tabungan iB Bisnis Hasanah). Serta simpanan non transaksional yakni simpanan investasi/mudharabah (tabungan iB Tapenas Hasanah, Deposito iB Hasanah).

Pasca spin off, keadaan bank BNI Syariah menurut Achmad Khotib dalam jurnal akuntabilitasnya menyebutkan bahwa dari segi kinerja BNI Syariah sebelum spin off tidak berbeda signifikan dengan

kinerja BNI Syariah sesudah spin off.¹¹ Kondisi tersebut dikarenakan setelah spin off, BNI Syariah mendapat tambahan modal sebesar Rp 1 triliun yang digunakan untuk investasi jangka panjang seperti pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi sehingga keuntungan/manfaatnya yang berdampak kepada profitabilitas belum dapat dirasakan dalam jangka pendek dan peningkatan profitabilitas perusahaan melambat karena keuntungan atau manfaat dari investasi tersebut belum dapat dirasakan secara langsung pada awal-awal tahun. Selain itu, BNI Syariah belum dapat mengendalikan biaya-biaya yang diakibatkan karena kegiatan spin off sehingga tingkat profitabilitas perusahaan setelah spin off menurun. Namun, sesudah spin off, BNI Syariah lebih berani dalam menyalurkan dana pihak ketiga melalui ekspansi pembiayaan dibanding sebelum spin off.¹² Kinerja Bank BNI Syariah setelah spin off akan terus semakin berkembang karena tidak sulit menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan Bank BNI Syariah karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.¹³

Pelaksanaan spin off tidak serta merta dilakukan dengan mudah, namun memerlukan strategi-strategi yang matang agar spin off berhasil dan mampu mewujudkan tujuan dilakukan pemisahan tersebut. Unit usaha syariah yang ada saat ini tentunya perlu memiliki strategi untuk dapat bersaing dengan bank syariah yang sudah memiliki pangsa pasar yang cukup besar, salah satunya melalui pelaksanaan spin off. Pelaksanaan spin off harus dilakukan secara efektif, baik dari sisi waktu, biaya maupun proses pelaksanaannya. Untuk menghasilkan dampak positif yang maksimal pada kinerja unit syariah, proses spin off harus

¹¹ Achmad Chotib, Studi Kinerja PT. Bni Syariah Sesudah Pemisahan (Spin Off), Jurnal Akuntabilitas: Vol. VII No. 2, Agustus 2014, Universitas Mercu Buana, dikutip pada tanggal 20 Oktober 2018, pukul 18.30 wib.

¹² *Ibid*

¹³ Wawancara Bapak Fendi Prihantoro, Kepala Bagian Umum Bank BNI Syariah cabang Surakarta di Jl. Slamet Riyadi No. 318 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Surakarta, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 10.00 wib.

didasari oleh latar belakang yang jelas. Syakir (2008) dalam penelitiannya menjelaskan beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi spin off, yaitu:¹⁴

BUS memiliki kemudahan melakukan efisiensi biaya, proses perpindahan sumberdaya serta kemudahan pengukuran kinerja bagi bank serta karyawan.

Pemerintah, melalui Bank Indonesia, juga memberikan dukungan bagi unit usaha syariah untuk mendorong pencapaian target pangsa pasar dan mendukung implementasi arsitektur perbankan syariah nasional.

3.2 Pembahasan

Pemisahan unit perbankan syariah dari induk perbankan konvensional mereka dimulai pada tahun 2008. Instruksi dari spin-off tertuang dalam pasal 68 dari undang-undang perbankan syariah khususnya diatur dalam ketentuan peralihan. Sebagian besar hukum Indonesia terdiri dari ketentuan peralihan yang berarti 'bila diperlukan atau bila diperlukan'. Definisi ini berarti bahwa tidak semua undang-undang memiliki ketentuan peralihan dan hanya hukum tertentu yang diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum karena perubahan dalam ketentuan perundang-undangan. Ketentuan transisi di umumnya terletak pada baik yang berbentuk atau terpisah dalam ketentuan penutup.

Pasal 68 UU diatur dalam ketentuan transisi berarti bahwa pasal ini mencoba untuk memberikan perlindungan hukum bagi industri perbankan dalam masa transisi yang 15 tahun sejak diberlakukannya undang-undang perbankan. Ketentuan ini akan diberlakukan pada tahun 2023 yang menyiratkan bahwa hukuman akan diberikan kepada pengabaian peraturan tersebut. Pasal tersebut menyebutkan tentang ketentuan dalam hal bahwa bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah (UUS) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari nilai total aset induk perusahaan bank, unit Islam harus

¹⁴ *Loc Cit*, Achmad Chotib, hal. 129

melakukan spin off untuk mengubahnya menjadi sebuah bank komersial islam.

Dalam rangka membantu bank-bank konvensional untuk mempercepat proses spin-off, Bank Indonesia menawarkan dua pilihan. Pertama, bank-bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah bisa mendirikan bank umum syariah baru dan, kedua, hak dan tanggung jawab dari unit usaha syariah dipindahkan ke bank-bank umum syariah yang ada.

Unit usaha syariah memisahkan melalui pembentukan bank umum syariah; ini mungkin melibatkan pendirian bank syariah melalui spin-off bisa dilakukan oleh satu atau lebih bank konvensional yang memiliki unit syariah. Bank Islam harus memenuhi setidaknya rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8%. Mengenai pembentukan bank umum syariah, harus memberikan dua lisensi dari Bank Indonesia. Menurut pasal 46 Peraturan Bank Indonesia tentang unit perbankan syariah menegaskan bahwa sebelum pendirian bank komersial Islam yang dihasilkan dari pemisahan diberikan dua lisensi dari Bank Indonesia dalam (2) tahap: yang pertama adalah persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank komersial Islam akibat pemisahan, dan yang kedua adalah mendapatkan izin usaha, yang merupakan lisensi yang diberikan setelah BUS siap melakukan kegiatan operasional.

Memisahkan unit usaha melalui pengalihan hak dan kewajiban ke bank komersial yang ada Islam; pengalihan hak dan kewajiban hanya dapat dilakukan kepada bank umum syariah yang terhubung ke bank konvensional dengan unit syariah.¹⁵

Sanksi akan dikenakan jika unit Islam yang telah memenuhi persyaratan yang mengabaikan spin-off. Sanksi tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/19/PBI/2009 sebagai sanksi

¹⁵ *Loc Cit*, Wardah Yuspin, hal 137-138

administratif yang sesuai dengan pasal 58 perbankan syariah no 21 tahun 2008. Sanksi administratif adalah sebagai berikut:

Sebuah teguran tertulis dan denda sebesar Rp 1 juta (100 dolar) per hari kerja keterlambatan untuk setiap laporan dan/atau pengumuman untuk tidak lebih dari Rp 15 juta (USD 1.500).

Sebuah teguran tertulis dan denda sebesar Rp 30 juta (USD 3.000) disebagian besar, jika bank induk perbankan konvensional atau unit syariah tidak menyerahkan laporan keuangannya.

Setelah mengamati kondisi unit islam dan mandat UU perbankan syariah, mungkin bahwa pilihan untuk melaksanakan spin-off harus dipertimbangkan dengan baik dan dipersiapkan oleh induk bank konvensional sejak dini. Spin-off diharapkan membuat manajemen perbankan syariah lebih fokus pada bisnis inti mereka. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa industri perbankan syariah membutuhkan komitmen penuh dari para pemangku kepentingan untuk menjadi lebih tangguh dan kuat. Dengan spin-off, bank induk konvensional dapat lebih fokus pada bisnis inti utama mereka yang mengembangkan usaha perbankan konvensional. Demikian pula bank umum syariah baru ini juga dapat lebih fokus pada bisnis intinya syariah.¹⁶

Salah satu keuntungan dari metode spin-off adalah bahwa jumlah modal yang disetor untuk mendirikan BUS yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan akuisisi dan konversi metode. Modal yang disetor untuk mendirikan bank islam melalui metode spin-off hanya sekitar Rp 500 miliar (50 juta dolar) yang merupakan setengah dari persyaratan untuk mendirikan bank umum syariah melalui akuisisi dan konversi. Keuntungan lain dari metode ini adalah bahwa UUS sudah memiliki pelanggan setia sehingga akan lebih mudah untuk memprediksi keuntungan yang diperoleh. Namun, mengubah UUS ke BUS tidak akan berkembang dengan lancar jika bisnis tidak siap untuk dikonversi

¹⁶ Ibid, hal 139

menjadi BUS karena setelah itu bank yang dikonversi tidak akan mendapat dukungan penuh dari bank induknya.

Disamping keuntungan tersebut, terdapat pula kendala-kendala dalam pelaksanaan spin off. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Bank BNI Syariah cabang Solo pada tanggal 10 Oktober tahun 2018 kendala dalam pemilihan Sumber Daya Manusia untuk mencari karyawan dengan kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Selain yang terkait dengan recruitment karyawan, Bank BNI Syariah tidak memiliki kendala yang cukup berarti. Bank BNI syariah adalah badan usaha yang fungsinya untuk penghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat, yang sistem usahanya berdasarkan kepada hukum islam. Sumber daya manusia yang bekerja di Bank BNI Syariah pun dituntut untuk mampu mengerti dan memahami mengenai prinsip-prinsip hukum islam khususnya yang terkait dengan perbankan syariah.

Selain kendala yang telah disebutkan, pelaksanaan spin off memiliki tantangan mendasar yakni terkait ketiadaan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai arahan perencanaan dan landasan teknis spin off. Regulasi yang ada hanya memberi pedoman bagaimana operasional sebagai UUS dan operasional sebagai BUS. Tidak ada pijakan bagaimana operasional selama masa transisi spin-off. Beberapa area krusial tantangan yang mesti diantisipasi oleh UUS dan bank induk, yaitu, pertama, infrastruktur IT dan e-banking. Kedua, kerja sama jaringan. Ketiga, kapasitas pendanaan. Keempat, permodalan. Peluang pengembangan bisnis terkait pengelompokan bank umum. Pertama, infrastruktur IT dan e-banking menjadi prioritas utama karena tanpanya operasional bank tidak dapat berjalan dan kebutuhan transaksi nasabah tak terpenuhi. Pasca spin off, UUS yang telah menjadi BUS baru didorong memiliki sistem IT yang terpisah dari induknya. Jika spin off melalui skema pertama, infrastruktur IT dan ebanking disiapkan melalui pengadaan baru infrastruktur existing bank induk. Dengan skala

ekonomis yang lebih kecil, opsi pengadaan baru tentu akan berdampak signifikan terhadap keuangan BUS yang baru beroperasi.

Kendala yang dirasakan oleh bank sebenarnya pada siklus awal pemisahan dimana bank sudah harus mandiri tanpa harus bertumpu pada finansial dari bank konvensional. Masalah finansial menjadi hal yang urgent bagi setiap perbankan syariah yang mengalami dan melakukan spin off. Berbeda dengan bank Konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (shahib al maal) dengan pengelola dana (mudharib).

Tantangan mendasar terkait spin-off adalah ketiadaan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai arahan perencanaan dan landasan teknis spin-off. Regulasi yang ada hanya memberi pedoman bagaimana operasional sebagai UUS dan operasional sebagai BUS. Tidak ada pijakan bagaimana operasional selama masa transisi spin-off. Beberapa area krusial tantangan yang mesti diantisipasi oleh UUS dan bank induk, yaitu, pertama, infrastruktur IT dan e-banking. Kedua, kerja sama jaringan. Ketiga, kapasitas pendanaan. Keempat, permodalan. Peluang pengembangan bisnis terkait pengelompokan bank umum (BUKU). Pertama, infrastruktur IT dan e-banking menjadi prioritas utama karena tanpanya operasional bank tidak dapat berjalan dan kebutuhan transaksi nasabah tak terpenuhi. Pasca-spin-off, UUS yang telah menjadi BUS baru didorong memiliki sistem IT yang terpisah dari induknya. Jika spin-off melalui skema pertama, infrastruktur IT dan ebanking disiapkan melalui pengadaan baru atau cloning infrastruktur existing bank induk. Dengan skala ekonomis yang lebih kecil, opsi pengadaan baru tentu akan berdampak signifikan terhadap keuangan BUS yang baru beroperasi. Di sisi lain, coverage dan fitur e-banking juga akan lebih terbatas sehingga menurunkan standar layanan yang dinikmati nasabah. Pada opsi cloning, meski lebih efisien dan memastikan kelancaran leverage operasional, dalam jangka panjang justru

memperlambat pengembangan sistem mengingat platformnya adalah IT perbankan konvensional. Kedua, kerja sama jaringan juga menjadi faktor yang sangat penting mengingat banyak UUS yang mengandalkan jaringan outlet konvensional atau unit kerja induknya untuk memasarkan dan memproses produk syariahnya. Dengan spin-off, hal ini tetap dapat dijalankan melalui konsep Layanan Syariah Bank (LSB), tapi dibatasi hanya untuk produk pendanaan. Perbedaan sistem IT dan perubahan KPI (pejabat/petugas bank induk) juga akan menjadi kendala teknis yang sangat memengaruhi servis level kerja sama jaringan. Ketiga, struktur dana UUS selama ini didukung dana bank induk yang memungkinkan UUS menawarkan pricing pembiayaan yang kompetitif. Dengan spin-off, UUS yang menjadi BUS dituntut mandiri sehingga struktur dananya kemungkinan besar memburuk karena didominasi pertumbuhan dana mahal berupa deposito untuk mendukung tingginya kebutuhan ekspansi pembiayaan setiap tahun. Ini masalah seluruh BUS existing saat ini. Keempat, sebagai BUS baru dengan permodalan sendiri yang jauh lebih kecil dari induknya, dipastikan bisnis pembiayaan menjadi lebih terbatas. Dengan modal lebih kecil, batas maksimum penyaluran pembiayaan (BMPP) juga mengecil. Kelima, dengan cuma satu UUS yang beraset di atas Rp 10 triliun saat ini, berdasar proyeksi moderat hingga 2020 kemungkinan hanya terdapat kurang dari 30 persen UUS yang akan menjadi BUS di kelompok BUKU 2, selebihnya masuk kelompok BUKU

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat disampaikan adalah

Proses pembentukan bank BNI Syariah diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menerapkan strategi pengembangan jaringan cabang kantor cabang di kota-kota potensial dan kota-kota besar

di Indonesia. Proses persiapan perpindahan spin off pada Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah di Bank BNI juga dilakukan dengan persiapan-persiapan lain seperti persiapan gedung, recruitment sumber daya manusia, dan ijin dari bank Indonesia juga otoritas jasa keuangan.

Dalam pelaksanaannya, bank BNI Syariah sebagai bank umum syariah menerapkan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah islam dengan mengeluarkan beberapa produk seperti tabungan, deposito, dan lain sebagainya tanpa bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

Pasca spin off, keadaan bank BNI Syariah menurut Achmad Khotib dalam jurnal akuntabilitasnya menyebutkan bahwa dari segi kinerja BNI Syariah sebelum spin off tidak berbeda signifikan dengan kinerja BNI Syariah sesudah spin off karena keuntungan atau manfaat dari investasi tersebut belum dapat dirasakan secara langsung pada awal-awal tahun. Akan tetapi sesudah spin off, BNI Syariah lebih berani dalam menyalurkan dana pihak ketiga melalui ekspansi pembiayaan dibanding sebelum spin off. Bapak Fendi Prihantoro pun menyatakan bahwa setelah spin off, kinerja Bank BNI Syariah semakin berkembang karena tidak sulit untuk menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan Bank BNI Syariah karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Kendala perpindahan spin off di Bank BNI Syariah adalah dalam bidang sumber daya manusia dan IT. Sumber daya manusia yang bekerja di Bank BNI Syariah pun dituntut untuk mampu mengerti dan memahami mengenai prinsip-prinsip hukum islam khususnya yang terkait dengan perbankan syariah. Infrastruktur IT dan e-banking menjadi prioritas utama karena pasca spin off, UUS yang telah menjadi BUS baru didorong memiliki sistem IT yang terpisah dari induknya tanpanya operasional bank tidak dapat berjalan dan kebutuhan transaksi nasabah tak terpenuhi.

4.2 Saran

- 1) Untuk Bank yang masih melaksanakan Unit Usaha Syariah dihimbau untuk melaksanakan Spin Off karena sudah ada undang-undang yang telah mengatur tentang Spin Off.
- 2) Untuk Bank yang sudah Menjadi Bank Umum Syariah diharapkan pelaksanaan perbankan sesuai dengan pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, “sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional, Vol. II, No. 2, Desember 2008, hal.159-160.
- Achmad Chotib, Studi Kinerja PT. Bni Syariah Sesudah Pemisahan (Spin Off), Jurnal Akuntabilitas: Vol. VII No. 2, Agustus 2014, Universitas Mercu Buana, dikutip pada tanggal 20 Oktober 2018, pukul 18.30 wib.
- Ahmad Nizar, 2015, Analisis Tingkat Efisiensi Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off, Skripsi, Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal. 31-33.
- <http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/sejarah.aspx>
- Institut Bankir Indonesia (2001), *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Penerbit Djambatan) hal.23.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal.211.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 3
- Rifin A, Saptono IT, Pemilihan Metode Spin Off Unit Bisnis Syariah, Jurnal Al-Muzara’ah 124 (ISSN p: 2337-6333; e: 2355-4363), Magister Manajemen dan Bisnis, dikutip pada tanggal 12 Oktober 2018, pukul 115.30 wib.
- Wawancara Bapak Fendi Prihantoro, Kepala Bagian Umum Bank BNI Syariah cabang Surakarta di Jl. Slamet Riyadi No. 318 Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Surakarta, pada tanggal 10 Oktober 2018, Pukul 10.00 wib.